RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
15. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
16. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu *output*/keluaran.
17. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
18. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
19. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
24. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
25. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
26. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD yang memuat memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
BAB V PENUTUP.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:

a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;
oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;

tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NGANJUK 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memperhatikan:

(a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2024; (c) evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2024 dalam pencapaian hasil (outcome); (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas- bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk

menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan forum perangkat daerah; (4) Perumusan Rancangan Akhir; dan (5) Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun konsep Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1.1. Konsep Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019mNomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan – Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jatim Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur untuk periode 2023-2043;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jatim Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).

38. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab Nganjuk 2025-2045;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
42. Peraturan Bupati Nganjuk No. 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
43. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
44. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
45. Peraturan Bupati Nganjuk No. 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Rumah Khusus Sederhana.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam

kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

1.2. Landasan Hukum;

1.3. Maksud dan Tujuan; dan

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya);

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan ;

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinera Perangkat Daerah;

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan;

2.2.2 Perumusan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD 2025-2029.
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pendanaan Indikatif;
4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4.3 Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan termasuk dinas daerah, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit organisasi bersifat khusus Kabupaten Nganjuk.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. **Tugas Pokok**

   Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

2. **Fungsi**

   Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

   a. Perencanaan dan koordinasi penyediaan infrastruktur bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
   b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
   c. Pelaksanaan pembinaan umum, teknis dan operasional bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
e. Pemberian rekomendasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Struktur Perangkat Daerah

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan koordinasi, pengawasan, ketatausahan dan membagi tugas kegiatan bawahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

Sekretariat

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tatausaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan asn kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
4) Pembinaan aparatur;
5) Pengelolaan urusan kepegawaian;
6) Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
7) Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
8) Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;

9) Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1) Melaksanakan urusan persuratan;
2) Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
4) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
5) Melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
6) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat.

Bidang Perumahan Rakyat menyelenggaarakan fungsi:

1) Penyusunan dan penetapan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) di bidang perumahan rakyat;
2) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan rakyat yang meliputi penetapan kebijakan strategis, pengelolaan dan pemeliharaan perumahan rakyat.
3) Perencanaan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
4) Pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
5) Pembangunan dan rehabilitasi korban bencana atau relokasi program kabupaten;
6) Pendistribusian dan serah terima korban bencana atau relokasi program kabupaten;

7) Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
8) Penerbitan izin pengembangan dan pembangunan perumahan
9) Penerbitan Sertifikat Izin Kepemilikan Gedung (SKGB);
10) Peningkatan Prasarana, Sarana Utilias (PSU) umum;
11) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan rakyat;
12) Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
13) Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hokum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU umum tingkat kemampuan kecil;
14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan yang berkaitan dengan tugasnya.

c) Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang permukiman dan pertanahan.

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
3) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
4) Penataan dan peningkatan kawasan kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha;
5) Pemberian ijin lokasi dalam 1 (satu) kabupaten dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha;
6) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
7) Penyelesaian masalah tanah kosong, pengelolaan izin membuka tanah dan penatagunaan tanah;

8) Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
9) Penerbitan izin membuka tanah;
10) Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu kabupaten; dan
11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang berkaitan dengan tugasnya.

Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai tugas;

1) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian ijin lokasi dalam rangka penanaman moda dan kemudahan berusaha;
2) Melaksanakan inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) Daerah;
3) Melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah;
4) Melaksanakan penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 (satu) Daerah;
5) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
6) Melaksanakan inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah;
7) Melaksanakan inventarisasi dan rekomendasi objek redistribusi tanah;
8) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agrarian dalam 1 (satu) kabupaten;
9) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
10) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong di dalam 1 (satu) daerah provinsi;
11) Melaksanakan inventarisasi tanah kosong;
12) Melaksanakan pemanfaatan tanah kosong;
13) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah;
14) Melaksanakan pengendalian pemanfaatan tanah negara;

15) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah;
16) Melaksanakan pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten;
17) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten;
18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
    1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2) Subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional.
c. Bidang Perumahan Rakyat, membawahi :
    1. Subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional.
d. Bidang Permukiman dan Pertanahan, membawahi :
    1. Seksi Pertanahan.
    2) Subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari susunan organisasi di atas, struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dapat di jabarkan pada bagan sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK



2.1.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, salah satu aspek yang sangat mendukung adalah tersedianya SDM baik ditinjau dari segi kecukupan akan kuantitas juga ditinjau dari segi kualitas SDM. Berikut dijelaskan kondisi SDM yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1)Personil :

Tabel 2.1

Data Administrasi Personil

Menurut Golongan

URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1. Golongan I	Orang	3
2. Golongan II	Orang	5
3. Golongan III	Orang	16
4. Golongan IV	Orang	3
5. PPPK	Orang	4
6. Non ASN	Orang	7
Jumlah	**Orang**	**38**

Data : per September 2025

Tabel 2.2

Data Administrasi Personil

Menurut Pendidikan

No	Perangkat Daerah	Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir						
		SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3
1	Dinas PRKPP	1	2	8	4	20	2	1
Total Pegawai		**38**						

Data : per September 2025

Tabel 2.3

Data Administrasi Personil

Menurut Jabatan

No	Perangkat Daerah	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	PPPK	Non ASN
1	Dinas PRKPP	5	5	17	4	7
Total Pegawai		**38**				

Data : per September 2025

2)Sarana dan Prasarana

Selain Aspek SDM, Sarana Prasarana sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Adapun Sarana Prasarana yang ada dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Data Sarana dan Prasarana

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Mobil Dinas Jabatan	Unit	1
2	Mobil Dinas Lapangan	Unit	3
3	Sepeda motor	Unit	11
4	Tanah	Bidang	2
5	Bangunan Gedung	Unit	2

Data : per Juli 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk baru terbentuk pada tahun 2017 yang sebelumnya bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah. Namun dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk menangani Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan permukiman dan pertanahan. Berikut gambaran capaian kinerja dan penganggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten

Nganjuk tahun 2020-2024, berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 serta Tahun 2024-2026:

Tabel TC. 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020-2024

Kabupaten Nganjuk

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra DPRKPP Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan	81,77			82,31	83,36				95,68	99,85				116,24	119,78			
2	Persentase sistem air limbah skala rumah tangga/ komunitas/kawasan/kota				61,14	64,03				53,21	59,57				87,03	81,21			
3	Persentase Pemenuhan drainase lingkungan				88,28	89,69				77,78	79,84				88,11	89,02			
4	Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan	60			78,2	79,45				75,18	76,24				96,14	95,96			
5	Persentase pengurangan backlog perumahan				10,92	10,78													
6	Persentase Ketersediaan rumah layak huni				90,71	92,46	92,96	93,21		86,95	93,68	86,22	85,91		95,86	93,68	92,74	92,17	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra DPRKPP Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	dan terjangkau																		
7	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh				25	37,5	47,5	58,5	28,23		21,34	47,82	69,89	53,61		56,91	100,67	119,47	189,89
8	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan dalam Kabupaten						100	100				100	100				100	100	
9	Persentase Rumah Layak Huni								96,94					96,97					100,03

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2018-2023 DAN 2024-2026

Pada Indikator Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh untuk Tahun 2024 menggunakan baseline kawasan kumuh baru yakni sesuai SK Bupati Nganjuk Nomor 188/44/K/411.013/2023 dengan luasan sebesar 155,88 Ha, sehingga pada Tahun 2024 target yang di tetapkan lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Tabel TC.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tahun 2020-2024 Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
SEBELUM PERUBAHAN																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	384,01					320,15					83,37					384,01	320,15
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	482,84					381,69					79,05					482,84	381,69
3	Program peningkatan disiplin aparatur	2,4					2					83,33					2,4	2
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30					28,67					95,55					30	28,67
5	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan/ Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan	9.717,40					8.767,55					90,23					9.717,40	8.767,55
6	Program Lingkungan Sehat Permukiman/ Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	11.279,55					10.289,25					91,22					11.279,55	10.289,25
7	Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas																0	0

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Umum																	
8	Program Peningkatan Kinerja UPTD	83,85					55,02					65,62					83,85	55,02
SESUDAH PERUBAHAN																		
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum		4.935,40					4.046,17					81,98%				4937,2	4.046,17
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		3.676,60					3.551,25					96,59%				3676,6	3.551,25
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		3.774,15					3.330,71					88,25%				3774,15	3.330,71
12	Program Penyelenggaraan Jalan		26.602,92	2.756,17				25.746,12	2.756,17				96,78%	100%			27.981,01	27.124,21
13	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		6.825,71	7.395,33	6.499,81	6.609,45		6.290,97	6.792,11	5.677,51	5.388,63		92,17%	91,84%	87,35%	81,53%	6.832,58	5.785,70
14	Program Pengembang Perumahan		17.324,99	8.330,36	2.135,78	1.033,76		12.358,96	7.568,69	2.057,59	982,67		71,34%	90,86%	96,34%	95,06%	7.206,22	5.133,07
15	Program Kawasan Permukiman		3.574,57	2.036,38	9.448,90	4.774,19		3.139,64	1.746,02	9.386,91	4.754,92		87,83%	85,74%	99,34%	99,60%	4.958,51	4.756,87
16	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		4.200	5.808,39	5.160,94	4.889,42		3.903,74	5.555,81	5.082,90	4.881,31		92,95%	95,65%	98,49%	99,83%	5.014,69	4.622,65
17	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		676,28	1.468,28	3.582,00	2.145,65		444,69	1.432,69	3.403,52	2.054,83		65,76%	97,58%	95,02%	95,77%	1.968,05	1.967,68
18	Program Penyelesaian Sengketa Tanah				11,40					7,197					63,12%		11,40	7,197

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Garapan																	
19	Program Penatagunaan Tanah			1.118,64	5.393,60	3.279,88			839,83	4.049,73	2.549,00			75,08%	75,08%	77,72%	3.264,04	2.479,52

Sumber: LRA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

Adapun analisis data dan informasi kinerja tahun 2020-2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk berikut :

Urusan Pemerintahan Bidang PKP

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perumahan dan Kawasan permukiman didefinisikan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menyelenggarakan Kegiatan pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan tersebut bermuara pada komitmen untuk mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat kabupaten Nganjuk. Berikut beberapa data hasil Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024:

1. **Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau**

   Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

   1) Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (*sufficient living space*);
   2) Memiliki akses terhadap air minum layak;
   3) Memiliki akses terhadap sanitasi layak;
   4) Ketahanan bangunan (*durable housing*).

   Selain terpenuhinya 4 (empat) kriteria tersebut, syarat kesehatan lainnya berupa :

   1) Pencahayaan; dan
   2) Penghawaan yang cukup.

Adapun Perhitungan Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Nganjuk berdasarkan formulasi berikut :

$$\frac{Jumlah\ Rumah\ Layak\ Huni}{Jumlah\ Total\ Rumah} x\ 100\%$$

Berikut analisis dan evaluasi capaian kinerja persentase ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau tahun 2020 s.d. 2024:

Tabel 2.5

Jumlah Rumah di Kabupaten dan Jumlah Rumah Layak Huni

Keterangan	**Tahun**				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Jumlah Rumah di Kabupaten Nganjuk (unit)	323.305	325.293	327.281	329.269	316.157
Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	281.124 (86,95 %)	281.761 (86,62%)	282.180 (86,22%)	282.888 (85,91%)	306.582 (96,97%)

Data tahun 2020 s.d. 2023 berdasarkan data LKJIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Pada tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk melakukan penyusunan dokumen RP3KP Kabupaten Nganjuk, berdasarkan hasil kajian pada dokumen tersebut terdapat koreksi data jumlah total rumah di Kabupaten Nganjuk beserta jumlah rumah layak huni, data ini beserta hasil kinerja tahun 2024 kemudian dijadikan acuan perhitungan kinerja tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6

Data Sebaran Rumah Layak Huni di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No	**Kecamatan**	**Luas Persil (Ha)**	**Jumlah Rumah (unit)**	**Jumlah Rumah Tidak Layak Huni**	**Jumlah Rumah Layak Huni**
1	Sawahan	135,114	10280	549	9731
2	Ngetos	133,575	10529	257	10272
3	Berbek	184,9	15824	294	15530
4	Loceret	266,357	20536	504	20032
5	Pace	237,606	18405	320	18085
6	Tanjunganom	451,623	33644	328	33316
7	Prambon	271,744	20460	181	20279
8	Ngronggot	377,281	24695	119	24576
9	Kertosono	186,39	14985	143	14842
10	Patianrowo	151,567	11681	434	11247
11	Baron	201,565	14792	206	14586
12	Gondang	225,674	16624	2085	14539

No	Kecamatan	Luas Persil (Ha)	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni
13	Sukomoro	178,865	13475	341	13134
14	Nganjuk	202,812	17639	77	17562
15	Bagor	227,941	18752	276	18476
16	Wilangan	130,085	9673	255	9418
17	Rejoso	288,493	22072	662	21410
18	Ngluyu	71,354	5675	469	5206
19	Lengkong	120,358	9822	1023	8799
20	Jatikalen	75,864	6594	1052	5542
Nganjuk		**4119,168**	**316.157**	**9.575**	**306.582**

Sumber: Dinas PRKPP Kab Nganjuk Tahun 2024

Berikut beberapa faktor pendorong kinerja persentase ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau :

a. Adanya kolaborasi pendanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) baik melalui pendanaan APBD maupun APBN dan BAZNAS;
b. Tersedianya SDM yang kompeten dan tingkat pendidikan sesuai standar;
c. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas;
d. Dukungan dan peran aktif dari masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat serta tantangan dalam pencapaian kinerja persentase ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau adalah sebagai berikut :

a. Adanya penurunan kualitas rumah, sehingga terjadi peningkatan RTLH;
b. Terjadinya pertumbuhan penduduk mengakibatkan bertambahnya kebutuhan rumah layak huni;
c. Didalam RPJPD Kabupaten Nganjuk periode 2025-2045 terdapat Mandatory penyelarasan indikator utama pembangunan (IUP) beserta targetnya yaitu Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, terjangkau dan Berkelanjutan, dengan target 2045 sebesar 100% IUP ini juga menjadi salah satu indikator sasaran dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan IUP ini tentu akan berpengaruh pada perhitungan baseline sesuai dengan definisi IUP dan penentuan target pada perencanaan selanjutnya. Adapun berdasarkan data jumlah rumah layak huni dan data jumlah rumah tangga Kabupaten Nganjuk 2024, didapatkan rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan

berkelanjutan Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 Kabupaten Nganjuk sebesar 74,44 %

2. Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh

Pengentasan Kawasan permukiman kumuh perkotaan merupakan amanat dari tujuan ke 11 SDG's, dengan target "Pada tahun 2030 menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh". Untuk itu Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga berupaya dalam pengurangan luasan Kawasan perumahan dan permukiman kumuh Kabupaten Nganjuk.

Perhitungan persentase pengurangan luasan kawasan kumuh berdasarkan formulasi berikut :

$$\frac{Luas\ total\ kawasan\ kumuh\ dalam\ SK\ (Ha) - Luas\ Tahun\ n\ (Ha)}{Luas\ total\ kawasan\ kumuh\ dalam\ SK\ (Ha)} x\ 100\%$$

Adapun perhitungan pengurangan luasan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021 s.d. 2023 adalah berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/208/K/411.012/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nganjuk, dengan luas 131,2 Ha, sedangkan perhitungan pengurangan tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/44/K/411.013/2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nganjuk, dengan luas 155,88.

Berikut analisis dan evaluasi capaian kinerja Persentase pengurangan luasan kawaan kumuh tahun 2020 s.d. 2024

Keterangan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Luas SK Kawasan Perumahan dan Permukiman kumuh (Ha)	131,2	131,2	131,2	155,88
Pengurangan Kawasan Perumahan dan Permukiman kumuh Komulatif (Ha)	28 Ha (21,34 %)	62,68 (47,77%)	91,70 (69,89%)	118,23 (75,83%)
Sisa Luasan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh (Ha)	103.2	68.52	39,5	37,65

Sumber: Dinas PRKPP kabupaten Nganjuk, 2021-2024

Berikut beberapa tantangan dalam upaya peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman kumuh maupun pencegahan terhadap berkembangnya kawasan permukiman kumuh baru, diantaranya :

a. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman yang berpotensi menimbulkan kawasan kumuh baru;
b. Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/44/K/411.013/2023 tersebut belum mencakup seluruh kawasan permukiman perkotaan di 20 Kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Sehingga pada tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk melaksanakan pendataan baseline Kawasan Perumahan dan permukiman kumuh di seluruh wilayah permukiman perkotaan/perdesaan di 20 Kecamatan. Hasil baseline 2024 selanjutnya dijadikan acuan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh melalui Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/166/K/411.013/2025 tentang Penetapan Lokasi Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nganjuk, dengan luas 408,12 Ha dan sebagai dasar perhitungan target penanganan kawasan permukiman kumuh pada periode perencanaan 2025-2030. Berikut lokasi serta luasan Perumahan dan Permukiman Kumuh berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/166/K/411.013/2025 :

No	Nama Lokasi / Kawasan	Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh (Ha)	RT/RW	Desa / Kelurahan	Kecamatan
1	Ngumpul	0,67	RT 3 / RW 1	Ngumpul	Bagor
2	Malangbong	0,88	RT 2 / RW 1		
3	Kedungkajar	0,57	RT 1 / RW 2		
4	Balongrejo	1,14	RT 2 / RW 2	Balongrejo	
5	Wates	1,70	RT 4 / RW 1		
			RT 5 / RW 1		
6	Balongpesing	1,64	RT 1 / RW 8	Gandu	
			RT 2 / RW 8		
			RT 3 / RW 8		
7	Mlaten	1,06	RT 2 / RW 6		
8	Krajan	1,67	RT 4 / RW 3	Bagor Kulon	
9	Jekek	2,95	RT 1 / RW 1	Jekek	Baron
			RT 2 / RW 1		

No	Nama Lokasi / Kawasan	Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh (Ha)	RT/RW	Desa / Kelurahan	Kecamatan
10	Kuniran	0,95	RT 2 / RW 9		
11	Bendil	6,43	RT 1 / RW 7	Berbek	Berbek
			RT 2 / RW 7		
			RT 3 / RW 7		
			RT 4 / RW 7		
12	Sopan	7,39	RT 4 / RW 4	Sonopatik	
			RT 5 / RW 4		
			RT 1 / RW 2		
			RT 1 / RW 1		
			RT 7 / RW 1	Tiripan	
13	Tawing Bringkil	1,57	RT 1 / RW 1	Grojogan	
			RT 2 / RW 1		
14	Patranrejo	1,56	RT 7 / RW 4	Patranrejo	
15	Kantren	1,15	RT 5 / RW 3	Tiripan	
16	Ngujung	8,85	RT 1 / RW 2	Ngujung	Gondang
			RT 1 / RW 1		
			RT 2 / RW 1		
			RT 1 / RW 1		
			RT 2 / RW 2		
			RT 1 / RW 5		
			RT 2 / RW 3		
			RT 2 / RW 4		
17	Nglinggo Krajan	1,32	RT 1 / RW 4	Nglinggo	
18	Kedung Celeng	0,76	RT 6 / RW 1	Ketawang	
19	Ketawang	2,10	RT 4 / RW 3	Ketawang	
20	Kedung Galih	1,17	RT 2 / RW 3	Kedungglugu	
21	Kawedekan	1,97	RT 21 / RW 8	Balonggebang	
22	Begendeng	4,60	RT 1 / RW 1	Begendeng	Jatikalen
			RT 2 / RW 1		
			RT 3 / RW 1		
			RT 3 / RW 2		
			RT 2 / RW 3		
23	Kedungtunggak	1,56	RT 1 / RW 8	Jatikalen	
			RT 2 / RW 8		
24	Dlururejo	1,02	RT 4 / RW 1	Dlururejo	
25	Dawuhan	3,79	RT 11 / RW 3	Dawuhan	
			RT 12 / RW 3		
			RT 13 / RW 3		
26	Krawilan	9,73	RT 6 / RW 2		
			RT 7 / RW 2		

No	Nama Lokasi / Kawasan	Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh (Ha)	RT/RW	Desa / Kelurahan	Kecamatan
			RT 8 / RW 2		
			RT 9 / RW 2		
			RT 10 / RW 2		
27	Cekel	7,99	RT 1 / RW 1		
			RT 2 / RW 1		
			RT 3 / RW 1		
			RT 4 / RW 1		
			RT 5 / RW 1		
28	Lumpang Kuwik	7,02	RT 2 / RW 1	Lumpang Kuwik	
			RT 3 / RW 1		
			RT 1 / RW 3		
			RT 2 / RW 3		
			RT 3 / RW 3		
			RT 2 / RW 4		
			RT 3 / RW 4		
29	Tondowesi	1,65	RT 1 / RW 2	Pule	
30	Pule	0,60	RT 1 / RW 1		
31	Perning	2,81	RT 6 / RW 1	Perning	
			RT 7 / RW 1		
32	Seloguno	8,41	RT 3 / RW 2		
			RT 5 / RW 2		
			RT 6 / RW 2		
			RT 7 / RW 2		
			RT 8 / RW 2		
			RT 9 / RW 2		
			RT 10 / RW 2		
33	Sumbergondang	3,77	RT 1 / RW 3		
			RT 2 / RW 3		
34	Pinggir Rel	3,41	RT 2 / RW 1	Kutorejo	Kertosono
			RT 4 / RW 2		
			RT 6 / RW 3		
35	Templek	0,87	RT 11 / RW 5		
36	Nglawak	3,56	RT 1 / RW 2	Nglawak	
			RT 2 / RW 2		
37	Pilangkenceng	0,46	RT 1 / RW 10		
38	Pelem	2,98	RT 1 / RW 6	Pelem	
			RT 3 / RW 6		
			RT 3 / RW 5		
39	Klinter	1,69	RT 1 / RW 1		
40	Tembarak Utara	7,85	RT 1 / RW 2	Tembarak	
			RT 1 / RW 3		
			RT 1 / RW 5		
			RT 2 / RW 3		

No	Nama Lokasi / Kawasan	Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh (Ha)	RT/RW	Desa / Kelurahan	Kecamatan
			RT 2 / RW 4		
			RT 2 / RW 5		
41	Dukuh	5,63	RT 1 / RW 2	Ketandan	Lengkong
			RT 4 / RW 2		
			RT 5 / RW 2		
			RT 6 / RW 2		
			RT 6 / RW 1		
			RT 5 / RW 1		
42	Sumberejo	3,20	RT 1 / RW 9	Ngringin	
			RT 2 / RW 9		
			RT 3 / RW 10		
			RT 4 / RW 10		
43	Jerukwangi	2,71	RT 6 / RW 2	Banjardowo	Lengkong
			RT 1 / RW 2		
44	Banjaranyar	1,87	RT 2 / RW 4	Sawahan	
45	Besuk	1,36	RT 8 / RW 1	Sukorejo	Loceret
46	Sumberklampok	9,81	RT 1 / RW 4	Macanan	
			RT 2 / RW 4		
			RT 3 / RW 4		
			RT 4 / RW 4		
47	Plangkat	3,69	RT 1 / RW 8	Bajulan	
			RT 2 / RW 8		
48	Cacingan	1,11	RT 5 / RW 3	Jatirejo	Nganjuk
49	Kramat	1,64	RT 4 / RW 5	Kramat	
50	Klumpit	1,54	RT 3 / RW 5	Kartoharjo	
51	Belpas Wage	1,32	RT 1 / RW 10	Payaman	
			RT 2 / RW 10		
52	Bonggah	3,17	RT 4 / RW 5	Ploso	
			RT 7 / RW 6		
53	Tengger	3,90	RT 1 / RW 5	Blongko	Ngetos
			RT 5 / RW 5		
54	Salam Judeg	4,74	RT 1 / RW 6		
			RT 3 / RW 6		
55	Dodol	7,44	RT 1 / RW 4	Klodan	
			RT 13 / RW 5		
			RT 14 / RW 5		
56	Nglebak	2,15	RT 5 / RW 7		
57	Sumber	5,28	RT 1 / RW 2	Kuncir	
58	Dlopo	8,50	RT 1 / RW 6	Kepel	
			RT 5 / RW 6		
			RT 1 / RW 7		
			RT 3 / RW 7		
			RT 5 / RW 7		

No	Nama Lokasi / Kawasan	Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh (Ha)	RT/RW	Desa / Kelurahan	Kecamatan
			RT 3 / RW 8		
59	Tawangrejo	6,56	RT 1 / RW 3		
			RT 5 / RW 3		
			RT 6 / RW 3		
			RT 1 / RW 5		
			RT 3 / RW 4		
60	Sukonodo	1.63	RT 1 / RW 9	Ngetos	
			RT 2 / RW 9		
61	Oro Oro Ombo	3.16	RT 1 / RW 1	Oro-oro ombo	
			RT 2 / RW 1		
			RT 3 / RW 1		
62	Wonokroko	4.78	RT 1 / RW 2		
			RT 2 / RW 2		
			RT 4 / RW 2		
			RT 5 / RW 2		
63	Suru	6.71	RT 1 / RW 1	Suru	
			RT 2 / RW 1		
			RT 2 / RW 2		
			RT 3 / RW 2		
64	Watulanang	5.33	RT 1 / RW 1		
			RT 3 / RW 1		
			RT 3 / RW 2		
65	Nitis	3.49	RT 1 / RW 5	Mojoduwur	
			RT 2 / RW 5		
			RT 3 / RW 5		
			RT 4 / RW 5		
66	Gampeng	1.53	RT 3 / RW 2	Gampeng	Ngluyu
67	Puncu	2.35	RT 2 / RW 2		
68	Ngluyu	1.18	RT 13 / RW 3	Ngluyu	
69	Jonggang	2.21	RT 2 / RW 1	Sugihwaras	Ngluyu
70	Semen	1.79	RT 8 / RW 3		
71	Cabean	2.84	RT 10 / RW 4		
			RT 12 / RW 4		
72	Talun	0.55	RT 14 / RW 4	Tempuran	
73	Tanjungkalang	6.72	RT 3 / RW 3	Tanjungkalang	Ngronggot
			RT 3 / RW 5		
			RT 4 / RW 5		
74	Dayang	9.06	RT 1 / RW 1	Trayang	
			RT 2 / RW 1		
			RT 3 / RW 1		
			RT 1 / RW 1	Dadapan	
			RT 2 / RW 1		
75	Payaman	1.85	RT 1 / RW 1	Trayang	

No	Nama Lokasi / Kawasan	Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh (Ha)	RT/RW	Desa / Kelurahan	Kecamatan
			RT 2 / RW 1		
76	Banjarsari	2.26	RT 1 / RW 7	Banjarsari	
77	Sumbersari	3.80	RT 2 / RW 2	Mojokendil	
			RT 3 / RW 2		
78	Kates	2.17	RT 1 / RW 3	Pace Wetan	Pace
			RT 2 / RW 3		
79	Kedungmboto	1.38	RT 2 / RW 2	Ngepung	Patianrowo
			RT 3 / RW 2		
80	Termas	2.63	RT 26 / RW 7	Babadan	
			RT 27 / RW 7		
81	Nglaban	3.46	RT 33 / RW 9		
			RT 36 / RW 9		
82	Gilig	3,61	RT 37 / RW 10		
			RT 38 / RW 10		
			RT 39 / RW 10		
83	Babadan	2.06	RT 5 / RW 2	Babadan	
84	Doyok	1.21	RT 1 / RW 7	Tirtobinangun	
85	Buntut	2.92	RT 3 / RW 8		
			RT 4 / RW 8		
86	Balongkendal	2.00	RT 1 / RW 4		
			RT 2 / RW 4		
87	Ngrombot		RT 2 / RW 2	Ngrombot	
			RT 3 / RW 2		
88	Kurung	1.48	RT 5 / RW 1	Kurungrejo	Prambon
89	Ngetrep	1.21	RT 7 / RW 2		
90	Sugihwaras	1.66	RT 1 / RW 10	Sugihwaras	
91	Benden	2.51	RT 4 / RW 11	Gondangleg i	
92	BanyuurIp	0.88	RT 45 / RW 11	Sonoageng	
93	Tanjungtani	4.93	RT 3 / RW 4	Tanjungtan i	
			RT 20 / RW 6		
			RT 22 / RW 7		
			RT 27 / RW 9		
94	Banyuurip	1.21	RT 1 / RW 1	Rejoso	Rejoso
95	Ngreco	3.04	RT 1 / RW 5	Sukorejo	
			RT 3 / RW 5		
96	Duwel	2.57	RT 4 / RW 1		
			RT 1 / RW 2		
97	Mlorah	9.06	RT 1 / RW 7	Mlorah	

No	Nama Lokasi / Kawasan	Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh (Ha)	RT/RW	Desa / Kelurahan	Kecamatan
			RT 2 / RW 7		
			RT 3 / RW 7		
			RT 2 / RW 3		
			RT 4 / RW 3		
			RT 2 / RW 2		
			RT 3 / RW 2		
			RT 4 / RW 2		
			RT 5 / RW 2		
98	Rawalingi	1.39	RT 1 / RW 2	Setren	
99	Mungkung	0.95	RT 1 / RW 2	Mungkung	
100	Puhkerep	9,62	RT 1 / RW 2	Puhkerep	
			RT 2 / RW 2		
			RT 4 / RW 2		
			RT 5 / RW 2		
101	Bulak	5.62	RT 1 / RW 8	Margopatut	Sawahan
			RT 2 / RW 9		
			RT 2 / RW 10		
			RT 2 / RW 11		
102	Batu Kidul	2,43	RT 2 / RW 12		
			RT 3 / RW 12		
103	Batulor	0.77	RT 1 / RW 13		
			RT 2 / RW 13		
104	Ngroto	3.95	RT 1 / RW 15		
			RT 2 / RW 15		
			RT 1 / RW 16		
			RT 2 / RW 16		
			RT 1 / RW 17		
105	Sidorejo Jurang Budeng	2.32	RT 1 / RW 18		
			RT 2 / RW 18		
106	Batu Watuwayang	1.46	RT 1 / RW 14		
			RT 2 / RW 14		
107	Patut	3.49	RT 1 / RW 23		
			RT 3 / RW 23		
			RT 1 / RW 22		
108	Sembung	5.75	RT 1 / RW 29		
			RT 2 / RW 29		
			RT 3 / RW 29		
			RT 1 / RW 31		
			RT 2 / RW 31		
			RT 3 / RW 31		
			RT 1 / RW 30		
109	Bakalan	4.94	RT 2 / RW 4	Duren	
			RT 3 / RW 4		

No	Nama Lokasi / Kawasan	Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh (Ha)	RT/RW	Desa / Kelurahan	Kecamatan
110	Gedang Klutuk	1.65	RT 6 / RW 6	Sawahan	
			RT 7 / RW 6		
			RT 8 / RW 6		
111	Gambyok Tegir	2.09	RT 2 / RW 4		
112	Jeblok	1.88	RT 6 / RW 3		
113	Padusan	3.48	RT 1 / RW 1	Bagorwetan	Sukomoro
			RT 3 / RW 1		
114	Kajang	1.75	RT 17 / RW 6	Bungur	
115	Kapas	9.90	RT 1 / RW 4	Kapas	
			RT 2 / RW 4		
			RT 3 / RW 4		
			RT 4 / RW 4		
			RT 5 / RW 4		
			RT 6 / RW 4		
			RT 7 / RW 4		
			RT 1 / RW 7		
			RT 2 / RW 7		
			RT 3 / RW 7		
116	Bulupacing	0.82	RT 9 / RW 2	Putren	
117	Gempolan	1.06	RT 1 / RW 12	Sumengko	
118	Mlaten	4.61	RT 26 / RW 12	Ngrami	
			RT 27 / RW 12		
119	Bulurejo	2.90	RT 2 / RW 2	Warujayeng	Tanjungan om
120	Saru	9.51	RT 5 / RW 5	Sambirejo	
			RT 3 / RW 5	Warujayeng	
			RT 3 / RW 1		
			RT 2 / RW 3		
			RT 1 / RW 6		
121	Tawangsari	1.96	RT 1 / RW 1	Kedungombo	
122	Jegong	7.08	RT 1 / RW 1	Wilangan	Wilangan
			RT 4 / RW 2		
			RT 5 / RW 2		
			RT 6 / RW 2		
123	Punthuk	4.33	RT 2 / RW 6	Ngudikan	
			RT 3 / RW 6		
124	Manggarejo	1.79	RT 4 / RW 2	Mancon	
	Total	**408.12**			

Sumber Data : SK Bupati Nomor 100.3.3.2/166/K/411.103/2025

3. Penyelenggaraan Sarana, Prasarana dan Utilitas (PSU) perumahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah mengamanatkan keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dengan dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah. Sebagai tindak lanjut amanat Permendagri Nomor 9 Tahun 2009, telah dundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah.dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Dalam rangka memenuhi amanat ketentuan perundangan untuk mernberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, serta memenuhi MCP KPK saat ini pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk berupaya untuk melakukan percepatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah.

sampai dengan tahun 2024 terdapat 31 PSU perumahan yang telah dilaksanakan serah terima dari pengembang kepada pemerintah daerah dari 143 total perumahan yang ada di kabupaten Nganjuk. Berikut data PSU Perumahan yang telah diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk s/ d tahun 2024:

No	Nama Perusahaan	Nama Perumahan	Lokasi Perumahan
1.	PT. Putra Tunas Artha Mandiri	Puri Tanjung Persada	Loceret
2.	PT. Berlian Karya Pramudya	Bumi Berlian Asri	Loceret
3.	PT. Nirwana Prima Graha Indonesia	Grand Nirwana	Nganjuk
4.	PT. Muncul Berkah Abadi	Mastrip Megah Premium	Nganjuk
5.	PT. Tunas Indra Nuansa Mulia	Nuansa Kapas Asri	Sukomoro
6.	PT. Ratu Propertindo	Graha Mutiara	Nganjuk
7.	PT. Tunas Adi Karya	Griya Kedondong	Bagor

No	Nama Perusahaan	Nama Perumahan	Lokasi Perumahan
	Propertindo	Asri	
8.	PT. Tri Mega Gading Mas	Griya Waung Asri	Baron
9.	PT. Tri Mega Gading Mas	Griya Asri III	Kertosono
10.	PT. Duta Graha Globalindo	Citra City	Nganjuk
11.	PT. Tunas Adi Karya Propertindo	Griya Jogomerto Asri	Tanjunganom
12.	PT. Tri Mega Gading Mas	Griya Nglawak Asri	Kertosono
13.	PT. Tri Sukses Manshurin	Sumengko Green	Loceret
14.	PT. Weka Utama Perkasa	Zahro In 1	Nganjuk
15.	PT. Weka Utama Perkasa	Zahro In 2	Nganjuk
16.	PT. Dian Adytamasentosa	Puri Mangundikaran	Nganjuk
17.	PT. Dian Adytamasentosa	Ganung Asri	Nganjuk
18.	PT. Bumi Purnama Raya	Villa Candi Mas	Loceret
19.	PT. Tirta Jaya Pesona	Green Begadung Residence	Nganjuk
20.	PT. Indo Karya Sanbtri	Taqiya Land	Kertosono
21.	PT. Tri Gatra Utama	Graha Gading	Kertosono
22.	PT. Tunas Adi Karya Propertindo	Griya Glotan asri	Tanjunganom
23.	PT. Cemara Gunung Sedayu	Griya Bumi Sedayu	Prambon
24.	PT. Bumi Inti Prakarsa	Bumi Jatirejo Residence	Nganjuk
25.	PT. Irfai Berkah Sejahtera	Griya Mastrip Regency	Nganjuk
26.	PT. Tirta Jaya Pesona	Green Werungotok Residence	Nganjuk
27.	PT. Putra Salim Grup	Green Safira Regency	Ketosono
28.	Graha Pilar Perkasa	Green Balongrejo Residence	Berbek
29.	PT. Irfa'I Berkah Sejahtera	Green Kertosono Residence	Kertosono
30.	PT.Ratu Propertindo	New Graha City	Bagor
31.	PT. Global Property Sukses	Mutiara Tanjungrejo Residence	Loceret

Dengan adanya serah terima PSU maka pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat melakukan intervensi pemeliharaan/ perbaikan PSU untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan aman. Adapun beberapa tantangan dalam upaya percepatan serah terima PSU, diantaranya:

1. Dokumen yang dijadikan persyaratan kurang lengkap

2. Sertifikat belum displit dan masih atas nama perorangan (belum atas nama perumahan).
3. Kurangnnya kesadaran Pengembang untuk menyerahkan PSU Perumahan.

Dari ke 31 PSU perumahan yang telah dilaksanakan serah terima dari pengembang kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk sampai dengan 2024 diperoleh data Persentase unit rumah yang terfasilitasi PSU, yaitu persentase keseluruhan unit rumah dalam perumahan yang sedang maupun sudah dibangun oleh pengembang/developer yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai berikut:

unit rumah pada 143 perumahan (Unit)	8.312 Unit
unit rumah pada 31 perumahan yang telah dilaksanakan serah terima PSU (Unit)	2.290 Unit (27,55%)

4. Pengelolaan Rumah Khusus Sederhana

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Rumah Khusus Sederhana. pemerintah kabupaten nganjuk melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk melakukan pengelolaan beberapa Rumah Khusus Sederhana yang diperuntukan Masyarakat berpenghasilan rendah dan/ atau yang terkena dampak bencana sosial/ bencana alam berikut data rumah khusus yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk:

No	Nama Rumah Khusus	Lokasi (Desa/Kecamatan)	Jumlah Unit Rumah	Jumlah Penghuni (RT/Jiwa)
1	Rumah Khusus (Rusus) Sumberkepuh	Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom	50 Unit rumah	148 Jiwa
2	Rumah Khusus (Rusus) Sendangbumen	Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek	99 Unit Rumah	289 Jiwa
3	Rumah Khusus (Rusus) Pandantoyo	Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono	25 Unit Rumah	81 Jiwa
4	Rumah Khusus (Rusus) Pisang	Desa Pisang Kecamatan Patianrowo	51 Unit rumah	172 Jiwa

Adapun beberapa tantangan dalam pengelolaan Rumah Khusus, diantaranya:

1. Status penghuni tidak sesuai MBR
2. Penghuni yang tidak menempati rumah khusus karena mempunyai tempat tinggal lain
3. Penghuni yang merubah dan menambah bangunan tanpa izin pihak pengelola

5. Penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan Tahun 2020-2024 :

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk juga mengampu pelaksanaan pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat yang terdiri dari :

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten

Berikut hasil pelaksanaan pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2022 s.d. 2024:

No	Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (unit rumah)	86	102	53
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota (unit rumah)	271	1	0

1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota pada tahun 2022 sebanyak 86 unit rumah yang terdapat pada 18 Kelurahan/Desa di Kabupaten Nganjuk. Pada tahun 2023 sebanyak 102 unit rumah yang terdapat pada 28 Kelurahan/Desa di Kabupaten Nganjuk. Adapun tahun 2024 sebanyak 53 unit rumah yang terdapat pada

12 Kelurahan/Desa di Kabupaten Nganjuk. Jenis bencana yang dimaksud diantaranya :

a) Hujan deras dan angin kencang;
b) Hujan deras;
c) Angin puting beliung;
d) Hujan angin;
e) Hujan lebat dan angin kencang.

2) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 sebanyak 271 unit rumah yang terdapat pada Desa Tritik dan Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso serta Desa Ngetos Kecamatan Ngetos. Pada tahun 2023 sebanyak 1 unit rumah dengan jenis relokasi program yakni daerah sempadan sungai terdapat pada Desa Banaran Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Adapun tahun 2024 terdapat nol unit rumah

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan dalam Kabupaten

Dalam rangka mendukung proses pembangunan, khususnya pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan urusan pertanahan. Penyelenggaraan urusan pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk melalui beberapa kegiatan fasilitasi dan koordinasi lintas sector untuk penyelesaian masalah pertanahan, dengan hasil sebagai berikut :

No	Tahun	Kegiatan yang dilaksanakan	
1	2022	1	Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi data bangunan permukiman terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol Kertosono Kediri di sejumlah 15 desa 3 kecamatan
		2	Melaksanakan identifikasi tanah milik Pemda di Kelurahan se Kabupaten Nganjuk sebanyak 20 Kelurahan

No	Tahun	Kegiatan yang dilaksanakan	
2	2023	1	Melakukan pembayaran biaya investasi dan akibat Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) untuk relokasi penduduk dampak pembangunan Bendungan Semantok atas nama Bupati Nganjuk berdasarkan dari tagihan Perum Perhutani Jatim dan Tagihan dari Kementerian LHK Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH)
		2	Memfasilitasi membuat penetapan lokasi tanah untuk pembangunan fasilitas umum sesuai dengan surat permohonan dari instansi yang memerlukan tanah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur untuk pekerjaan pelebaran jalan pada jembatan Kutorejo di Desa Kutorejo dan Desa Kerep Kidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk kurang lebih 2.400 meter persegi
3	2024	1	Melaksanakan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan Kawasan hutan (PPTPKH) untuk permukiman dan fasum fasos Kabupaten Nganjuk sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang persetujuan pelepasan Kawasan hutan seluas 54,65 Ha
		2	Proses penataan batas lahan pengganti dalam rangka tukar menukar Kawasan hutan (TMKH) Kabupaten Bondowoso berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penunjukan Kawasan hutan lindung yang berasal dari lahan pengganti dalam rangka TMKH seluas kurang lebih 18,80 Ha
		3	Melakukan pembayaran investasi pada lokasi persetujuan penggunaan Kawasan hutan non komersial untuk pembangunan penggunaan Kawasan hutan (penampungan korban bencana alam) atas nama Bupati Nganjuk sesuai surat tagihan Perum Perhutani Jawa Timur

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Tabel 2.7
Kelompok Sasaran Layanan

No	Nama Perangkat Daerah	Kelompok Sasaran
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota **Kelompok Sasaran :** Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman **Kelompok Sasaran :** Developer/Pengembang
		Kegiatan Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota **Kelompok Sasaran :** Masyarakat di Kab. Nganjuk
		Kegiatan Urusan penyelenggaraan PSU **Kelompok Sasaran :** Warga Lingkungan Perumahan di Kabupaten Nganjuk
		Kegiatan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hokum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil **Kelompok Sasaran :** Pengembang dengan kualifikasi kecil
		Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota **Kelompok Sasaran :** Masyarakat di Kab. Nganjuk
		Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota **Kelompok Sasaran :** Masyarakat di Kab. Nganjuk

2.1.5 Mitra Dalam Pemberian Layanan

Dalam rangka menjamin terselenggaranya layanan publik yang efektif, efisien, dan terkoordinasi dalam urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk memiliki sejumlah mitra kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Beberapa mitra kerja ini mencakup instansi pemerintah daerah, lembaga vertikal, serta pemangku kepentingan strategis lainnya yang berperan penting dalam mendukung koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lintas sektor. Mitra kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk guna koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara lain:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk;
2. Sekretariat Dearah Kabupaten Nganjuk;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk;
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nganjuk;
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;
9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk.

2.1.6 Dukungan DUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk terutama dalam pencapian akses rumah layak huni serta pengurangan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk membutuhkan dukungan dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Dukungan tersebut khususnya dalam penyediaan akses air minum yang layak dan mendukung fungsi sanitasi yang merupakan salah satu indikator rumah layak huni, serta pengurangan kawasan permukiman kumuh.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nganjuk saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi gambaran untuk mewujudkan rencana strategis. Berdasarkan hasil analisis data dan informasi capaian pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk pada Bab 2.3 serta mempertimbangkan Aspirasi/harapan pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah terdapat beberapa kesenjangan antara capaian dengan kondisi ideal yang diharapkan, sehingga didapatkan pemetaan permasalahan yang dihadapi pada bidang urusan PKP dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat Kawasan perumahan dan permukiman kumuh selus 408.12 Ha di 124 lokasi, 20 kecamatan yang harus ditangani
2. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman berpotensi menimbulkan kawasan kumuh baru
3. Terdapat gap pemenuhan amanat Indikator Utama Pembangunan" Rumah tangga dengan akses hunian Layak terjangkau dan berkelanjutan" dengan targel 100 % di 2045
4. Terbatasnya kemampuan/ akses pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah
5. Kurangnya intervensi kolaboratif dalam penyediaan rumah layak huni
6. Masih terdapat backlog rumah dan adanya pertumbuhan penduduk mengakibatkan bertambahnya kebutuhan rumah layak huni,
7. Masih terdapat PSU Perumahan yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga Pemda belum bisa intervensi melakukan pemeliharaan PSU yang rusak karena legalitas aset bukan milik Pemda.

2.2.2 Perumusan Isu Strategis

Isu Strategis merupakan keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah di Bidang PKP dan Pertaahan karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah di Bidang PKP dan Petanahan, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, Isu KLHS RPJMD serta penelaahan implikasi RTRW pada urusan PKP dan Pertanahan. Penentuan isu-isu strategis strategis juga mempertimbangkan isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan permukiman serta bidang pertanahan pada RPJMN (yang menjadi acuan perumusan Renstra K/L) serta RPJMD Provinsi Jawa Timur (yang menjadi acuan perumusan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur). Berikut Rumusan isu strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk:

Tabel 2.8

Matrik Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pertanahan yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan: 1. Masih tersedianya lahan untuk penyediaan perumahan 2. terdapat aset pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk fasilitas PKP 3. telah diserah terimakan PSU perumahan	Masih terdapat Kawasan perumahan dan permukiman kumuh selus 408.12 Ha di 124 lokasi, 20 kecamatan yang harus ditangani Menurunnya kualitas lingkungan permukiman berpotensi menimbulkan kawasan kumuh baru Terdapat gap pemenuhan amanat Indikator Utama Pembangunan" Rumah tangga dengan akses hunian Layak terjangkau dan berkelanjutan" dengan targel 100 % di 2045	E1. Kurang optimalnya Upaya pengentasan kemiskinan; L2. Potensi Peningkatan Risiko Bencana	Perubahan Iklim dan Lingkungan a. Pemanasan Global b. Curah hujan yang tidak menentu dan lebih ekstrem pemicu utama banjir dan tanah longsor	Lingkungan Hidup a. Perubahan Iklim b. Pencemaran Lingkungan c. Pengelolaan Sumber Daya Alam 2. Pembangunan Infrastruktur sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup;	Penanganan berupa Penataan, Peningkatan dan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh Peningkatan akses rumah layak huni serta infrastruktur Perumahan dan Kawasan permukiman

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	Terbatasnya kemampuan/ akses pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah					
	Kurangnya intervensi kolaboratif dalam penyediaan rumah layak huni					
	Masih terdapat backlog rumah dan adanya pertumbuhan penduduk mengakibatkan bertambahnya kebutuhan rumah layak huni					
	Masih terdapat PSU Perumahan yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga Pemda belum bisa intervensi melakukan pemeliharaan PSU yang rusak karena legalitas aset bukan milik Pemda					

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	Masih terdapat Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana dan adanya amanat amanat pemenuhan SPM bidang perumahan dalam Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten (Permen PUPR 13 tahun 2023)					
	Masih adanya masalah pertanahan (pemanfaatan tanah kosong untuk kepentingan umum yang belum terinventarisasi, proses legalisasi pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang tertunda, proses administrasi tukar menukar lahan/ kawasan hutan untuk kepentingan umum dan permukiman)					Optimalisasi penyelesaian permasalahan pertanahan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan. Adapun Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Nganjuk yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 serta Program Unggulan Kepala Daerah, sebagai berikut:

Visi RPJMD	:	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju, Sejahtera dan Bermatabat
Misi Ke 3 RPJMD	:	Mewujudkan percepatan pembangunan Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
Tujuan RPJMD	:	Meningkatkan Infrastruktur Publik yang Handal dan Berkelanjutan
Sasaran RPJMD	:	Meningkatnya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
Program Unggulan Kepala Daerah	:	1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran. 2. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran

Dalam mendukung pencapaian visi misi, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 maka Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk mempunyai tujuan, yaitu: "Meningkatnya akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan", Tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan dijabarkan lebih lanjut dalam 4 (empat) Sasaran Strategis yaitu:

1. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni;
2. Terwujudnya Lingkungan Tanpa Kumuh;
3. Meningkatnya PSU Perumahan Yang Layak dan Memadai;
4. Meningkatnya Intervensi Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerja dan targetnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan											
-Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Meningkatnya akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	74,49	74,50	74,51	74,52	74,53	74,54	74,55	
		Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni (%)	96,97	97,03	97,08	97,13	97,19	97,24	97,30	
		Terwujudnya Lingkungan Tanpa Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%)	0	4,90	9,80	14,70	19,60	24,50	29,40	
		Meningkatnya PSU Perumahan yang Layak dan Memadai	Persentase unit rumah yang terfasilitasi PSU (%)	27,55	30,77	31,94	33,06	34,13	35,17	36,16	
		Meningkatnya Intervensi Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan (%)	100	100	100	100	100	100	100	

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Peningkatan akses rumah layak huni serta infrastruktur Perumahan dan Kawasan permukiman
	Meningkatnya PSU Perumahan yang Layak dan Memadai	Percepatan penyerahan PSU Perumahan serta penyediaan PSU yang layak dan memadai
	Meningkatnya Intervensi Penyelesaian Masalah Pertanahan	Peningkatan Kolaborasi dan fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan
	Terwujudnya Lingkungan Tanpa Kumuh	Penanganan berupa Penataan, Peningkatan dan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh

Dalam melaksanakan strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dilaksanakan penahapan Pembangunan. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Penahapan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Meningkatkan jumlah rumah layak huni terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pengembangan kawasan perumahan terencana dan berkelanjutan, Pendataan dan pemetaan kebutuhan perumahan dan kawasan kumuh	**Penguatan Regulasi dan Kelembagaan** Pengembangan kebijakan tata ruang dan zonasi perumahan, Penyusunan regulasi teknis bangunan dan perumahan berbasis standar nasional, Penguatan sinergi lintas sektor: Bappeda, Dinas PU, Dinas Sosial, dan lainnya	**Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan** Fasilitasi bantuan stimulan, subsidi, atau kemitraan pembiayaan perumahan, Kolaborasi dengan perbankan dan pengembang swasta, Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa untuk perumahan	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Rumah** Penerapan model pembangunan berbasis masyarakat (*community-based housing*), Pelatihan teknis pembangunan rumah swadaya, Program padat karya untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni	**Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi** Penggunaan teknologi ramah lingkungan dan material bangunan inovatif, Digitalisasi sistem perizinan perumahan, Sistem informasi basis data rumah dan kawasan

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Nganjuk

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Lingkungan Hidup.	1 Penyediian perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau	
2	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) sebagaimana amanat Permen PUPR No. 14 Tahun 2018		2 Penyediaan PSU Perumahan yang layak dan memadai 3 Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh 4 Pencengahan berkembangnya luasan Kawasan kumuh 5 Penyelesaian masalah pertanahan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, kegiatan dan subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, maka disusun program, Kegiatan dan Subkegiatan yang digunakan sebagai pijakan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, berdasarkan urusan yang terdapat dalam Permendagri momor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Meningkatnya akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
		Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni			Persentase Rumah Layak Huni (%)		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.04.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
					Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Nganjuk	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
				Tersedianya unit rumah beserta PSU pada lokasi relokasi program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pendataan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
			Meningkatnya pembangunan perumahan oleh developer		Persentase Rumah terbangun oleh developer (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Terbitnya rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
					Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
			Meningkatnya pembangunan dan perbaikan rumah baru secara swadaya		Persentase Pengajuan PBG/SLF Rumah Swadaya yang diterbitkan (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Terfasilitasinya Penerbitan Sertiï¬ kat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) Rumah Tinggal	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) (Laporan)	1.04.02.2.07 - Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) (Laporan)	1.04.02.2.07.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	
			Terlaksananya intervensi penyediaan rumah layak huni diluar Kawasan kumuh Oleh Pemerintah		Persentase Unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha (%)	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				Pemberian bantuan sosial penyediaan rumah layak huni diluar Kawasan kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
		Terwujudnya Lingkungan Tanpa Kumuh			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%)		
			Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh		Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Tersusunnya dokumen Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
					Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
				Terlaksananya pembangunan infrastruktur kawasan permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
		Meningkatnya PSU Perumahan yang Layak dan Memadai			Persentase unit rumah yang terfasilitasi PSU (%)		
			Meningkatnya penyediaan PSU perumahan		Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU (%)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
				Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang ke Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
		Meningkatnya Intervensi Penyelesaian Masalah Pertanahan			Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan (%)		
			Meningkatnya Pemanfaatan Tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman bagi pemegang hak atas tanah		Persentase Bidang Tanah Yang Difasilitasi Penatagunaan Tanahnya (%)	2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
				Terlaksananya pemanfaatan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.2

Rencana Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					21.677.129.238,00		24.069.608.029,00		24.846.118.832,00		26.720.280.715,00		26.639.858.786,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.934.558.208,00		7.765.108.029,00		8.541.618.832,00		9.395.780.715,00		10.335.358.786,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	77,5	79	80	6.934.558.208,00	81	7.765.108.029,00	82	8.541.618.832,00	83	9.395.780.715,00	84	10.335.358.786,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1.130.000.000,00		1.130.000.000,00		1.230.000.000,00		1.130.000.000,00		1.230.000.000,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	880.000.000,00	100	860.000.000,00	100	960.000.000,00	100	860.000.000,00	100	960.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya pembangunan perumahan oleh developer	Persentase Rumah terbangun oleh developer (%)	55,52	55,59	55,67	150.000.000,00	55,74	150.000.000,00	55,81	150.000.000,00	55,87	150.000.000,00	55,94	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya pembangunan dan perbaikan rumah baru secara swadaya	Persentase Pengajuan PBG/SLF Rumah Swadaya yang diterbitkan (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	120.000.000,00	100	120.000.000,00	100	120.000.000,00	100	120.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					4.465.998.480,00		5.502.000.000,00		5.452.000.000,00		6.072.000.000,00		5.452.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	0	4,9	4,9	4.465.998.480,00	4,9	5.502.000.000,00	4,9	5.452.000.000,00	4,9	6.072.000.000,00	4,9	5.452.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					5.889.572.550,00		6.802.500.000,00		6.752.500.000,00		7.252.500.000,00		6.752.500.000,00	
Terlaksananya intervensi penyediaan rumah layak huni diluar Kawasan kumuh Oleh Pemerintah	Persentase Unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha (%)	2,44	3,24	2,77	5.889.572.550,00	3,24	6.802.500.000,00	3,26	6.752.500.000,00	3,28	7.252.500.000,00	3,3	6.752.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					3.257.000.000,00		2.870.000.000,00		2.870.000.000,00		2.870.000.000,00		2.870.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU (%)	21,68	23,78	25,87	3.257.000.000,00	27,97	2.870.000.000,00	30,07	2.870.000.000,00	32,17	2.870.000.000,00	34,27	2.870.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					350.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00	
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					350.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Bidang Tanah Yang Difasilitasi Penatagunaan Tanahnya (%)	99,75	100	100	350.000.000,00	100	360.000.000,00	100	360.000.000,00	100	360.000.000,00	100	360.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
TOTAL KESELURUHAN					22027129238.00		24429608029.00		25206118832.00		27080280715.00		26999858786.00	

Tabel 4.3

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				21.677.129.238,00		24.069.608.029,00		24.846.118.832,00		26.720.280.715,00		26.639.858.786,00		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.934.558.208,00		7.765.108.029,00		8.541.618.832,00		9.395.780.715,00		10.335.358.786,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	77,5	80	6.934.558.208,00	81	7.765.108.029,00	82	8.541.618.832,00	83	9.395.780.715,00	84	10.335.358.786,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				69.338.000,00		76.271.800,00		83.898.980,00		92.288.878,00		101.517.766,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	69.338.000,00	1	76.271.800,00	1	83.898.980,00	1	92.288.878,00	1	101.517.766,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.770.000,00		8.547.000,00		9.401.700,00		10.341.870,00		11.376.057,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	7.770.000,00	4	8.547.000,00	4	9.401.700,00	4	10.341.870,00	4	11.376.057,00		
1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7.770.000,00		8.547.000,00		9.401.700,00		10.341.870,00		11.376.057,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	7.770.000,00	1	8.547.000,00	1	9.401.700,00	1	10.341.870,00	1	11.376.057,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7.770.000,00		8.547.000,00		9.401.700,00		10.341.870,00		11.376.057,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	7.770.000,00	1	8.547.000,00	1	9.401.700,00	1	10.341.870,00	1	11.376.057,00		
1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				7.770.000,00		8.547.000,00		9.401.700,00		10.341.870,00		11.376.057,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	7.770.000,00	1	8.547.000,00	1	9.401.700,00	1	10.341.870,00	1	11.376.057,00		
1.04.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				7.770.000,00		8.547.000,00		9.401.700,00		10.341.870,00		11.376.057,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	7.770.000,00	1	8.547.000,00	1	9.401.700,00	1	10.341.870,00	1	11.376.057,00		
1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25.488.000,00		28.036.800,00		30.840.480,00		33.924.528,00		37.316.981,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	25.488.000,00	2	28.036.800,00	2	30.840.480,00	2	33.924.528,00	2	37.316.981,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1	7.320.500,00		
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.011.377.000,00		5.512.514.700,00		6.063.766.170,00		6.670.142.787,00		7.337.157.066,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	45	4.995.837.000,00	45	5.495.420.700,00	45	6.044.962.770,00	45	6.649.459.047,00	45	7.314.404.952,00		
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.995.837.000,00		5.495.420.700,00		6.044.962.770,00		6.649.459.047,00		7.314.404.952,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	45	4.995.837.000,00	45	5.495.420.700,00	45	6.044.962.770,00	45	6.649.459.047,00	45	7.314.404.952,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3	3	15.540.000,00	3	17.094.000,00	3	18.803.400,00	3	20.683.740,00	3	22.752.114,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7.770.000,00		8.547.000,00		9.401.700,00		10.341.870,00		11.376.057,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3	3	7.770.000,00	3	8.547.000,00	3	9.401.700,00	3	10.341.870,00	3	11.376.057,00		
1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				7.770.000,00		8.547.000,00		9.401.700,00		10.341.870,00		11.376.057,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	3	7.770.000,00	3	8.547.000,00	3	9.401.700,00	3	10.341.870,00	3	11.376.057,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		17.094.000,00		18.803.400,00		20.683.740,00		22.752.114,00		
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	0,00	1	17.094.000,00	1	18.803.400,00	1	20.683.740,00	1	22.752.114,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
1.04.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		8.547.000,00		9.401.700,00		10.341.870,00		11.376.057,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	0,00	1	8.547.000,00	1	9.401.700,00	1	10.341.870,00	1	11.376.057,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		8.547.000,00		9.401.700,00		10.341.870,00		11.376.057,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	0,00	1	8.547.000,00	1	9.401.700,00	1	10.341.870,00	1	11.376.057,00		
1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				226.700.000,00		369.370.000,00		406.307.000,00		446.937.700,00		491.631.470,00		
Tersedianya paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	85.500.000,00	1	94.050.000,00	1	103.455.000,00	1	113.800.500,00	1	125.180.550,00		
1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				85.500.000,00		94.050.000,00		103.455.000,00		113.800.500,00		125.180.550,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	85.500.000,00	1	94.050.000,00	1	103.455.000,00	1	113.800.500,00	1	125.180.550,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	141.200.000,00	50	275.320.000,00	50	302.852.000,00	50	333.137.200,00	50	366.450.920,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	43	50		50		50		50		50			
1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				141.200.000,00		155.320.000,00		170.852.000,00		187.937.200,00		206.730.920,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	43	50	141.200.000,00	50	155.320.000,00	50	170.852.000,00	50	187.937.200,00	50	206.730.920,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		120.000.000,00		132.000.000,00		145.200.000,00		159.720.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0,00	50	120.000.000,00	50	132.000.000,00	50	145.200.000,00	50	159.720.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	1	289.902.450,00	1	318.892.695,00	1	350.781.965,00	1	385.860.161,00	1	424.446.177,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.891.050,00		6.480.155,00		7.128.171,00		7.840.988,00		8.625.086,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	1	5.891.050,00	1	6.480.155,00	1	7.128.171,00	1	7.840.988,00	1	8.625.086,00		
1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				186.011.400,00		204.612.540,00		225.073.794,00		247.581.173,00		272.339.291,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	186.011.400,00	12	204.612.540,00	12	225.073.794,00	12	247.581.173,00	12	272.339.291,00		
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				98.000.000,00		107.800.000,00		118.580.000,00		130.438.000,00		143.481.800,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	1	98.000.000,00	1	107.800.000,00	1	118.580.000,00	1	130.438.000,00	1	143.481.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	400.574.300,00	12	440.631.730,00	12	484.694.904,00	12	533.164.393,00	12	586.480.833,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12.000.000,00		13.200.000,00		14.520.000,00		15.972.000,00		17.569.200,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	1	12.000.000,00	1	13.200.000,00	1	14.520.000,00	1	15.972.000,00	1	17.569.200,00		
1.04.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.928.750,00		10.921.625,00		12.013.788,00		13.215.166,00		14.536.683,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	3	9.928.750,00	3	10.921.625,00	3	12.013.788,00	3	13.215.166,00	3	14.536.683,00		
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				259.359.000,00		285.294.900,00		313.824.390,00		345.206.829,00		379.727.512,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	259.359.000,00	12	285.294.900,00	12	313.824.390,00	12	345.206.829,00	12	379.727.512,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				119.286.550,00		131.215.205,00		144.336.726,00		158.770.398,00		174.647.438,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	119.286.550,00	1	131.215.205,00	1	144.336.726,00	1	158.770.398,00	1	174.647.438,00		
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200.778.708,00		220.856.579,00		242.942.235,00		267.236.461,00		293.960.106,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	43	30		30		30		30		30			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	31	6		6		6		6		6			
1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				109.810.000,00		120.791.000,00		132.870.100,00		146.157.110,00		160.772.821,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	43	30	109.810.000,00	30	120.791.000,00	30	132.870.100,00	30	146.157.110,00	30	160.772.821,00		
1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				90.968.708,00		100.065.579,00		110.072.135,00		121.079.351,00		133.187.285,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	31	6	90.968.708,00	6	100.065.579,00	6	110.072.135,00	6	121.079.351,00	6	133.187.285,00		
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				116.400.000,00		128.040.000,00		140.844.000,00		154.928.400,00		170.421.240,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	116.400.000,00	12	128.040.000,00	12	140.844.000,00	12	154.928.400,00	12	170.421.240,00		
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				116.400.000,00		128.040.000,00		140.844.000,00		154.928.400,00		170.421.240,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	116.400.000,00	12	128.040.000,00	12	140.844.000,00	12	154.928.400,00	12	170.421.240,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				619.487.750,00		681.436.525,00		749.580.178,00		824.538.195,00		906.992.014,00		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	619.487.750,00	5	681.436.525,00	5	749.580.178,00	5	824.538.195,00	5	906.992.014,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				102.552.600,00		112.807.860,00		124.088.646,00		136.497.511,00		150.147.262,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	102.552.600,00	1	112.807.860,00	1	124.088.646,00	1	136.497.511,00	1	150.147.262,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				240.136.750,00		264.150.425,00		290.565.468,00		319.622.014,00		351.584.215,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	15	240.136.750,00	15	264.150.425,00	15	290.565.468,00	15	319.622.014,00	15	351.584.215,00		
1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.380.000,00		63.118.000,00		69.429.800,00		76.372.780,00		84.010.058,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	57.380.000,00	5	63.118.000,00	5	69.429.800,00	5	76.372.780,00	5	84.010.058,00		
1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				219.418.400,00		241.360.240,00		265.496.264,00		292.045.890,00		321.250.479,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	219.418.400,00	1	241.360.240,00	1	265.496.264,00	1	292.045.890,00	1	321.250.479,00		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1.130.000.000,00		1.130.000.000,00		1.230.000.000,00		1.130.000.000,00		1.230.000.000,00		
Meningkatnya pembangunan dan perbaikan rumah baru secara swadaya	Persentase Pengajuan PBG/SLF Rumah Swadaya yang diterbitkan (%)	100	100	100.000.000,00	100	120.000.000,00	100	120.000.000,00	100	120.000.000,00	100	120.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.02.2.07 - Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)				100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Terfasilitasinya Penerbitan Sertiï¬ kat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) Rumah Tinggal	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.02.2.07.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)				100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00		
Meningkatnya pembangunan perumahan oleh developer	Persentase Rumah terbangun oleh developer (%)	55,52	55,67	150.000.000,00	55,74	150.000.000,00	55,81	150.000.000,00	55,87	150.000.000,00	55,94	150.000.000,00		
1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terbitnya rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	10	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	880.000.000,00	100	860.000.000,00	100	960.000.000,00	100	860.000.000,00	100	960.000.000,00		
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (%)	100	100		100		100		100		100			
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				330.000.000,00		180.000.000,00		280.000.000,00		180.000.000,00		280.000.000,00		
Tersedianya data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan	1	1	330.000.000,00	1	180.000.000,00	1	280.000.000,00	1	180.000.000,00	1	280.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rumah (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		0		1		0		1			
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				100.000.000,00		0,00		100.000.000,00		0,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00		
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				0,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Nganjuk	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	0	0	0,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00		
1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator				0,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	0	0	0,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00		
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				450.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya unit rumah beserta PSU pada lokasi relokasi program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	20	10	450.000.000,00	8	500.000.000,00	8	500.000.000,00	8	500.000.000,00	8	500.000.000,00		
	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	0	5		5		5		5		5			
1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	0	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota				350.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	20	10	350.000.000,00	8	400.000.000,00	8	400.000.000,00	8	400.000.000,00	8	400.000.000,00		
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				4.465.998.480,00		5.502.000.000,00		5.452.000.000,00		6.072.000.000,00		5.452.000.000,00		
Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	0	4,9	4.465.998.480,00	4,9	5.502.000.000,00	4,9	5.452.000.000,00	4,9	6.072.000.000,00	4,9	5.452.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				0,00		0,00		0,00		620.000.000,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya dokumen Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	620.000.000,00	0	0,00		
	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1	0		0		0		1		0			
1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				0,00		0,00		0,00		210.000.000,00		0,00		
Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	210.000.000,00	0	0,00		
1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				0,00		0,00		0,00		410.000.000,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	410.000.000,00	0	0,00		
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				4.465.998.480,00		5.502.000.000,00		5.452.000.000,00		5.452.000.000,00		5.452.000.000,00		
Terlaksananya pembangunan infrastruktur kawasan permukiman kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	14	7	4.465.998.480,00	10	5.502.000.000,00	10	5.452.000.000,00	10	5.452.000.000,00	10	5.452.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan	0	1		1		1		1		1			
	Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)													
	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	22	10		20		20		20		20			
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	47	13		30		30		30		30			
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				316.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	47	13	316.000.000,00	30	650.000.000,00	30	650.000.000,00	30	650.000.000,00	30	650.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				35.000.000,00		140.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	0	1	35.000.000,00	1	140.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00		
1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				210.000.000,00		322.000.000,00		322.000.000,00		322.000.000,00		322.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	14	7	210.000.000,00	10	322.000.000,00	10	322.000.000,00	10	322.000.000,00	10	322.000.000,00		
1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh				3.904.998.480,00		4.390.000.000,00		4.390.000.000,00		4.390.000.000,00		4.390.000.000,00		
Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	22	10	3.904.998.480,00	20	4.390.000.000,00	20	4.390.000.000,00	20	4.390.000.000,00	20	4.390.000.000,00		
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				5.889.572.550,00		6.802.500.000,00		6.752.500.000,00		7.252.500.000,00		6.752.500.000,00		
Terlaksananya intervensi penyediaan rumah layak huni diluar Kawasan kumuh Oleh Pemerintah	Persentase Unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha (%)	2,44	2,77	5.889.572.550,00	3,24	6.802.500.000,00	3,26	6.752.500.000,00	3,28	7.252.500.000,00	3,3	6.752.500.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				5.889.572.550,00		6.802.500.000,00		6.752.500.000,00		7.252.500.000,00		6.752.500.000,00		
Pemberian bantuan sosial penyediaan rumah layak huni diluar Kawasan kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	0	10	5.889.572.550,00	10	6.802.500.000,00	10	6.752.500.000,00	10	7.252.500.000,00	10	6.752.500.000,00		
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	229	258		300		300		300		300			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				5.564.572.550,00		6.477.500.000,00		6.427.500.000,00		6.927.500.000,00		6.427.500.000,00		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	229	258	5.564.572.550,00	300	6.477.500.000,00	300	6.427.500.000,00	300	6.927.500.000,00	300	6.427.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	0	10	325.000.000,00	10	325.000.000,00	10	325.000.000,00	10	325.000.000,00	10	325.000.000,00		
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				3.257.000.000,00		2.870.000.000,00		2.870.000.000,00		2.870.000.000,00		2.870.000.000,00		
Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU (%)	21,68	25,87	3.257.000.000,00	27,97	2.870.000.000,00	30,07	2.870.000.000,00	32,17	2.870.000.000,00	34,27	2.870.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				3.257.000.000,00		2.870.000.000,00		2.870.000.000,00		2.870.000.000,00		2.870.000.000,00		
Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	9	12	2.887.000.000,00	11	2.500.000.000,00	11	2.500.000.000,00	11	2.500.000.000,00	11	2.500.000.000,00		
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				2.887.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	9	12	2.887.000.000,00	11	2.500.000.000,00	11	2.500.000.000,00	11	2.500.000.000,00	11	2.500.000.000,00		
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang ke Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1	1	370.000.000,00	1	370.000.000,00	1	370.000.000,00	1	370.000.000,00	1	370.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	4	5		5		5		5		5			
1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00		
1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	4	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00		
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				350.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				350.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemanfaatan Tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Bidang Tanah Yang Difasilitasi Penatagunaan Tanahnya (%)	99,75	100	350.000.000,00	100	360.000.000,00	100	360.000.000,00	100	360.000.000,00	100	360.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				350.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		
Terlaksananya pemanfaatan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	350.000.000,00	1	360.000.000,00	1	360.000.000,00	1	360.000.000,00	1	360.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				280.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	280.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00		
2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota				70.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	70.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		

4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Unggulan Kepala Daerah

No.	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	**(PU.1) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah**	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	
				Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
				Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
				Penatausahaan Pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	
			Meningkatnya pembangunan perumahan oleh developer	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
			Meningkatnya pembangunan dan perbaikan rumah baru	**Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**	

No.	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
			secara swadaya		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	
				Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Meningkatnya penyediaan PSU perumahan**	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
				Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	
				Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**Meningkatnya Pemanfaatan Tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman**	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten	
2	**(PU.3) Pengentasan kemiskinan dan pengangguran**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Terlaksananya intervensi penyediaan rumah layak huni diluar Kawasan kumuh Oleh Pemerintah**	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah**	
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar	

No.	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
				Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah**	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
				Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	

Tabel 4.5

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
1.	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
			1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
			1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
			1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
			1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
			1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
		Meningkatnya pembangunan perumahan oleh developer	1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	
			1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
		Meningkatnya pembangunan dan perbaikan rumah baru secara swadaya	1.04.02.2.07 - Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	
			1.04.02.2.07.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	
2.	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
			1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
			1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
			1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
3.	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Terlaksananya intervensi penyediaan rumah layak huni diluar Kawasan kumuh Oleh Pemerintah	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
4.	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
			1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
			1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
5.	2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Meningkatnya Pemanfaatan Tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman bagi pemegang hak atas tanah	2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	
			2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel 4.6

IKU Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan									
2.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	74,49	74,50	74,51	74,52	74,53	74,54	74,55	
3.	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	0	4,90	9,80	14,70	19,60	24,50	29,40	
5.	Persentase Rumah Layak Huni	%	96,97	97,03	97,08	97,13	97,19	97,24	97,30	
6.	Persentase unit rumah yang terfasilitasi PSU	%	27,55	30,77	31,94	33,06	34,13	35,17	36,16	

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.7
IKK Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
2.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	positif	%	0	4,90	9,80	14,70	19,60	24,50	29,40	
3.	Persentase unit rumah yang terfasilitasi PSU	positif	%	27,55	30,77	31,94	33,06	34,13	35,17	36,16	
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	negatif	%	3,03	2,97	2,92	2,87	2,81	2,76	2,70	
5.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
8.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	positif	%	0	100	100	100	100	100	100	
12.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	positif	%	66,63	68,55	74,70	82,86	90,93	95,97	100	
13.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, dalam hal ini pada penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan bidang Pertanahan. Adapun definisi dan formulasi perhitungan IKK mengikuti Pedoman Umum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

BUPATI NGANJUK,

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, S.E., S.H., M.M., M.B.A